



PUTUSAN
Nomor 577/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2940/PJ./2018, tanggal 21 Juni 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT ITOCHU INDONESIA, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 25 - 26, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28 - 30, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, 10350, yang diwakili oleh Hanamura Akira, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111625.16/2013/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 Maret 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding berharap Majelis Hakim dapat menerima permohonan banding ini dan membatalkan KEP 00187, sehingga dengan demikian perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Agustus 2013 yang seharusnya adalah menjadi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 577/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Pemohon Banding
1	Dasar Pengenaan Pajak	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
a.1	Ekspor	4.151.224.932,00
a.2	Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	146.682.111.274,00
a.3	Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
a.4	Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	13.163.886.447,00
a.5	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
a.6	Jumlah Seluruh Penyerahan	163.997.222.653,00
b.	Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak dan Kegiatan Membangun Sendiri	0,00
b.1	Impor BKP	0,00
b.2	Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00
b.3	Jumlah	0,00
2	Perhitungan PPN Lebih Bayar:	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	14.668.211.136,00
b.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	
b.1	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
b.2	Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan	18.716.312.376,00
b.3	STP (Pokok Kurang Bayar)	0,00
b.4	Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
b.5	Lain-lain	3.496.029.369,00
b.6	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	22.212.341.745,00
3	Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar	(7.544.130.609,00)

Bahwa Pemohon Banding dengan Surat Nomor 140/X/TC/TLU/2017 tanggal 4 Oktober 2017 melakukan pembetulan perhitungan PPN Masa Pajak Agustus 2013 yang seharusnya menjadi sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Pemohon Banding
1	Dasar Pengenaan Pajak	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
a.1	Ekspor	4.151.224.932,00
a.2	Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	146.682.111.274,00
a.3	Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 577/B/PK/Pjk/2019



	a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	13.163.886.447,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	a.6 Jumlah Seluruh Penyerahan	163.997.222.653,00
	b. Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak dan Kegiatan Membangun Sendiri	0,00
	b.1 Impor BKP	0,00
	b.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00
	b.3 Jumlah	0,00
2	Perhitungan PPN Lebih Bayar:	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	14.668.211.136,00
	b. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	18.716.312.376,00
	b.3 STP (Pokok Kurang Bayar)	0,00
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	b.5 Lain-lain	3.496.029.369,00
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	22.212.341.745,00
3	Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar	(7.544.130.609,00)
4	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	7.544.130.609,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	0,00
	c. Jumlah (a+b)	7.544.130.609,00
5	PPN Yang Kurang Dibayar	NIHIL

Bahwa sesuai dengan Pasal 46 UU PP, Pemohon Banding menyampaikan bahwa Pemohon Banding bersedia menghadiri keseluruhan proses persidangan untuk memberikan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen tambahan yang diperlukan. Untuk itu Pemohon Banding mohon untuk dapat diundang untuk menghadiri persidangan;

Bahwa mohon kiranya Majelis Yang Mulia dapat menerima dan mengabulkan permohonan banding ini dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 8 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111625.16/2013/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 Maret 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00187/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00064/207/13/059/15 tanggal 25 November 2015, atas nama: PT Itochu Indonesia, NPWP 01.069.147.5-059.000, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 25 - 26, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28 - 30, Jakarta, 10350, sehingga pajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1 Ekspor	4.151.224.932,00
	a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	146.682.111.274,00
	a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
	a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	13.163.886.447,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	a.6 Jumlah Seluruh Penyerahan	163.997.222.653,00
	b. Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak dan Kegiatan Membangun Sendiri	0,00
2	Perhitungan PPN Lebih Bayar:	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	14.668.211.136,00
	b. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
	b.2 Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan	18.716.312.376,00
	b.3 STP (Pokok Kurang Bayar)	0,00
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	b.5 Lain-lain	3.496.029.369,00
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	22.212.341.745,00
	Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar	(7.544.130.609,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	7.544.130.609,00

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 577/B/PK/Pjk/2019



	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	0,00
	c. Jumlah (a+b)	7.544.130.609,00
4	PPN Yang Kurang Dibayar	NIHIL

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Juli 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.111625.16/2013/PP/M.IVB Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.111625.16/2013/PP/M.IVB Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 untuk seluruhnya, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00187/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00064/207/13/059/15 tanggal 25 November 2015, atas nama: PT Itochu Indonesia, NPWP 01.069.147.5-059.000, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 25 - 26 Jalan M.H. Thamrin Kav. 28 - 30, Jakarta, 10350, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau: Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Agustus 2018 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00187/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor : 00064/207/13/059/15 tanggal 25 November 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.069.147.5-059.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Agustus 2013 sebesar Rp6.884.375,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* karena terbukti Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Faktur Pajak pada dasarnya telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur hukum, dan tidak ada kewajiban bagi Pembeli atau Pengguna Faktur Pajak untuk melakukan pengecekan/verifikasi atas Faktur Pajak terkait dengan kebenaran informasi atas Faktur Pajak, adapun apabila terdapat tidak urutnya serie faktur atau penggunaan tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak sebelum tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP Domisili hanya bersifat administrasi semata yang tidak menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 577/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak	
a	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
a.1	Ekspor	4.151.224.932,00
a.2	Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	146.682.111.274,00
a.3	Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
a.4	Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	13.163.886.447,00
a.5	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
a.6	Jumlah seluruh penyerahan	163.997.222.653,00
b	Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak dan Kegiatan Membangun Sendiri	0,00
2	Perhitungan PPN Lebih Bayar :	
a	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	14.668.211.136,00
b	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	
b.1	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
b.2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	18.716.312.376,00
b.3	STP (pokok kurang bayar)	0,00



	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	b.5 Lain-lain	3.496.029.369,00
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	22.212.341.745,00
	Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar	(7.544.130.609,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	7.544.130.609,00
	dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	0,00
	Jumlah (a+b)	7.544.130.609,00
4	PPN yang kurang dibayar	NIHIL

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 577/B/PK/Pjk/2019



Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001